

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 tahun 2022 pasal 51 menyebutkan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) yang beranggotakan tiga orang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota. Terbagi menjadi tiga divisi yang dipilih dan ditentukan melalui rapat pleno Panwaslucam, mempunyai tugas serta tanggungjawab yang berbeda akan tetapi melekat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi., divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat., dan divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Adapun tugas dari divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tidak terlepas dari pelanggaran dan sengketa yang merupakan dari panjangnya rangkaian proses dan hasil pemilihan umum dan pemilihan.

Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum terbagi menjadi empat :

1. Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran Adminisitratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah dugaan pelanggaran yang menyebabkan seseorang yang diduga melanggar dapat dikenai sanksi pidana pemilu, seperti politik uang, menyebar berita bohong dan melakukan praktik kampanye hitam (black campaign). Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu adalah wewenang penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di tingkatan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik petugas dari KPU maupun Bawaslu, dugaan pelanggaran kode etik ini dapat diproses dan dilaporkan kepada Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

4. Pelanggaran Hukum dan Undang-undang lainnya

Pelanggaran hukum dan undang-undang lainnya, adalah merupakan dugaan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkatan pelanggarannya, sebagai contoh adalah dugaan pelanggaran netralitas TNI-Polri, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selain itu di dalam pelaksanaan pemilu juga terdapat masalah sengketa dan perselisihan.

1. Sengketa Proses Pemilu

Sesuai Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Perselisihan Hasil Pemilu

Mengacu Pasal 473 UU No. 7 Tahun 2017 Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pasal 51 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 Tahun 2022 divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan pemilihan;
2. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
3. Penanganan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan;
4. Investigasi dugaan pelanggaran pemilu;
5. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
6. Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu serta tindak pidana pemilu dan pemilihan;
7. Penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Kecamatan Mojogedang sendiri merupakan salah satu kecamatan yang terdapat banyak sekali kegiatan menjelang pemilu tahun 2024. Untuk laporan maupun temuan di Kecamatan Mojogedang sendiri tidak ditemukan. Panwaslu Kecamatan Mojogedang serta PKD se-Kecamatan Mojogedang selalu mengutamakan pencegahan. Di setiap kegiatan pengawasan baik Panwascam maupun PKD selalu mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan bisa menjadi pelanggaran.

BAB VI

KERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024 pada 27 November 2023 – 10 Februari 2024. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan Kampanye yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, untuk laporan maupun temuan di Kecamatan Mojogedang sendiri tidak ditemukan. Panwaslu Kecamatan Mojogedang serta PKD se-

Kecamatan Mojogedang selalu mengutamakan pencegahan. Di setiap kegiatan pengawasan baik Panwascam maupun PKD selalu mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan bisa menjadi pelanggaran. Panwaslu Kecamatan Mojogedang mengedepankan pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadi pelanggaran dengan banyak melakukan sosialisasi tentang bahayanya *money politic* dan juga netralitas ASN serta perangkat desa, sehingga di kecamatan mojogedang tidak ada temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran. Berikut beberapa contoh dokumentasi pencegahan yang dilakukan oleh Panwascam dan PKD :





Selain itu Panwaslu Kecamatan Mojogedang juga selalu membuat form pencegahan yang dibuat setelah melakukan kegiatan pencegahan terutama pada saat kegiatan kampanye. Total keseluruhan Form F (Pencegahan) selama masa kampanye adalah 56. Berikut adalah tabel dari pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mojogedang serta PKD se-Kecamatan Mojogedang.

Form F Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Mojogedang			
NO	TGL KEGIATAN	JENIS PEMILU	PELAKSANA
1	7 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Bondan Sejiwan Boma Aji, S.Sos, MM
2	9 Desember 2023	Pemilihan Presiden- Wakil Presiden	Tim Kemenangan Anies-Amin
3	12 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Bambang Sutrisno

4	13 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H
5	15 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Sumanto, S.H., M.H
6	17 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Taufik Hidayat
7	17 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Bondan Sejiwan Boma Aji, S.Sos, MM , Eko Joko Iswanto, Endang Palupi, dan Ilyas Akbar Almadani.
8	17 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Boby Aditya Putra, S.Sos., M.M
9	18 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
10	19 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
11	22 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Tim Kampanye Partai Golkar
12	23 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
13	24 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
14	29 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
15	29 Desember 2023	Pemilihan Legislatif	Bobby Aditya Putra, S. Sos., M.M.
16	1 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Drs. H. Juliatmono, M.M.
17	3 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Dewi Wulan Sari
18	4 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Taufik Nur Hidayat
19	5 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Paryono, SH. MH
20	7 Januari 2024	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Abdullah Arya Prima Satya,S.E dan Tim Kemenangan Ganjar - Mahfud
21	7 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	H. Mukafi Fadli,ST, S.Ag., Eko Kurniawan, Murti Cahyaningsih, A. Md.
22	12 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Paryono SH, MH
23	14 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	H. Sumanto dan Bambang Sutrisno
24	15 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Tim Pemenangan Bapak Paryono, S.H., M.H
25	15 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Boby Aditya Putra S.Sos dan Sumanto, S.H
26	21 Januari 2024	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit, Bambang Sutrisno, dan Tim pemenangan Ganjar-Mahfud
27	21 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko S.T., M.H., dan Catur Agus Saptono S.H., M.H

28	22 Januari 2024	Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Tim Kemenangan Prabowo-Gibran
29	25 Januari 2024	Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Relawan Ganjar-Mahfud
30	25 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Taufik Nur Hidayat, Abdullah Rabbani, Drs. H Hamid Noor Yasin, M.M
31	27 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H.
32	27 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Bobby Aditya Putra, S. Sos., M.M. dan Bapak Sumanto, S.H.
33	27 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Tim Sukses Bapak Paryono, S.H., M.H.,
34	28 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Ria Ayu Rahayu
35	28 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Maria Ratna Dewi
36	31 Januari 2024	Pemilihan Legislatif	Drs. H. Juliyamono, MM, MH
37	3 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko S.T., M.H., dan Catur Agus Saptono S.H., M.H
38	3 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Tm Sukses Bapak Bondan Sejiwan Bomo Aji
39	4 Februari 2024	Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Tim kampanye Daerah Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar
40	4 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko S.T., M.H., dan Catur Agus Saptono S.H., M.H
41	5 Februari 2024	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Tim Kemenangan Anies-Amin
42	6 Februari 2024	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden	Ir. Sriyanto Saputro, MM dan Tim Kemenangan Prabowo-Gibran
43	8 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Mukafi Fadli dan Eko Kurniawan
44	9 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Bondan Sejiwan Bomo Aji, S. Sos. MM.
45	9 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Anung Marwoko, S.T., M.H
46	10 Februari 2024	Pemilihan Legislatif	Ilyas Akbar Almadani, S.I.P., Bondan Sejiwan Bomo Aji, S.Sos, MM., Drs. H. Juliatmono, M.M.

Dari data di atas ada beberapa hari yang jumlah kampanye lebih dari satu dan dilakukan oleh pelaksana yang sama dan hanya berbeda lokasi kampanye. Berikut lampiran link dari form pencegahan Panwaslu Kecamatan Mojogedang : <https://bit.ly/FormFpencegahanMojogedang>